

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Mukhtie Fadjar, 1997, *Hukum dan Penataan Kehidupan Politik di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang.

Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrianus Eryan, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pers, Depok.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004.

AP. Parlindungan, 1998, *Pendaftaran Tanah dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bahtiar Efendi, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pengarturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1993, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Bambang Sugono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bayu Suryaningrat, 1976, *Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat*, Korpri Unit Depdagri.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Bohar Soeharto, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Thesis)*, Tarsito, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Herlien Boediono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- J.Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius Pers, Yogyakarta, 2001.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Mudjiono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Said Sampara, et.al, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Salim HS, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H.S, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningtyas, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2008, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Widodo, 2002, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, Absolut, Yogyakarta.

## **B. Tesis**

Dwi Lestari, 2014, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kota Yogyakarta”, tesis Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Yuridiska Renanda Westri, “Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Aakta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.